



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS PADJADJARAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : TITA RIALITA
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG SUMBER DAYA DAN ORGANISASI
3. NHK : 854973

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.850.000.000

1. Tanah Seluas 980 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI  
Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI  
Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI  
Rp. 1.100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 153.500.000

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.  
150.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI  
Rp. 3.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 45.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 64.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 2.112.500.000

**III. HUTANG** Rp. 1.430.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 682.500.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.